



# Wacana Hak Angket Menguat

## Sebanyak 80 Anggota Dewan Bubuhkan Tanda Tangan

**PENGAJUAN** hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), terkait kisruh APBD DKI 2015 tinggal hitungan hari. Hingga kini, sebanyak 80 anggota DPRD DKI Jakarta telah menandatangani usulan pengajuan hak angket. Dengan kata lain, sebanyak 26 anggota dewan belum menandatangani.

Anggota Komisi D (bidang pembangunan) DPRD DKI Prabowo Soenirman menegaskan, sejumlah fraksi terus menggalang tanda tangan untuk mengajukan hak angket terhadap mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

"Sebanyak 80 anggota dewan telah menandatangani digulirkannya hak angket. Jumlah ini berarti sudah mencapai 75 persen dari total anggota DPRD periode 2014-2019 sebanyak 106 anggota," ujar Prabowo kepada INDOPOS, kemarin (22/2).

Mantan Dirut PD Pasar Jaya ini optimistis, paripurna hak angket terhadap Ahok akan digelar dalam waktu dekat. Apalagi sekitar 26 anggota DPRD lainnya segera menandatangani hak angket tersebut.

Dia mengungkapkan, dalam paripurna hak angket tersebut, dewan akan membentuk panitia angket yang tugasnya menyelidiki kesalahan-kesalahan Ahok. Salah satunya mengirim APBD yang bukan hasil pengesahan 27 Januari lalu ke Kemedagri.

Sebab Ahok telah mengunci semua usulan kegiatan program dalam e-budgeting sebelum adanya pengesahan. "Kalau Kemedagri memediasi APBD, hak angket tetap terus berjalan. Itu kan satu hal yang berbeda, Ahok itu sudah melanggar hukum dengan menyerahkan APBD bukan hasil pengesahan," ungkap dia.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana optimistis jika hak angket terkait polemik APBD 2015 akan berjalan mulus. Dengan begitu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

akan berhenti dari jabatannya.

Ia menegaskan, APBD yang diserahkan Ahok ke Kemedagri bukan APBD yang disahkan pada 27 Januari lalu. Sebab tidak ada tanda tangan Ketua DPRD, sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) Prasetio Edi Marsudi.

"Ini jelas pelanggaran hukum. Kami optimis hak angket yang kami gunakan akan memberhentikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta," sergah Triwisaksana.

Dalam beberapa kesempatan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi santai rencana hak angket dewan. Menurut dia, pengajuan angket adalah hak dewan, dan dirinya mempersiapkan saja para politisi Kebon Sirih mengagendakan hal itu. "Silahkan saja ajukan hak angket," tutur dia santai.

Seperti diketahui, kisruh APBD dan perseteruan antara dewan dengan Ahok lantaran beberapa hal. Di antaranya, Ahok menuding bahwa DPRD DKI Jakarta memasukkan anggaran siluman senilai Rp 8,8 triliun. Sehingga dilakukan pemeriksaan ulang dengan merekrut Tim Surabaya atau kalangan yang dibentuk dari luar birokrasi Pemprov DKI Jakarta.

Sementara kalangan dewan beranggapan bahwa Ahok beserta anak buahnya berusaha menyuap dewan dengan menyodorkan alokasi anggaran sebesar Rp 12 triliun. Tujuannya agar proses penyusunan anggaran tidak menuai kritisi dari kalangan dewan. (wok)



- Pelarangan sepeda motor di sejumlah ruas jalan



- Penggusuran tanpa uang kerohiman
- Mega proyek reklamasi Pantai Pluit City
- Menyalahi PP 58 tahun 2005 tentang Prosedur Penyelenggaraan APBD

GIMBALINDOPOS